

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PERATURAN MENTERI PANRB NO. 16 TAHUN 2017  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK**

Disusun Oleh:

NAMA : RACHMAT  
NPM : 2241021038  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK



**MAGISTER TERAPAN POLITEKNIK  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
JAKARTA 2023**

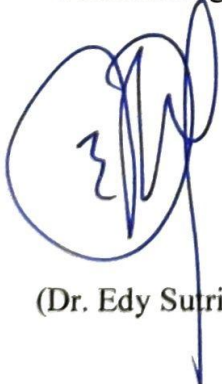
**PROGRAM STUDI**  
**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**  
**MAGISTER TERAPAN**  
**POLITEKNIK STIALAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Rachmat  
NPM : 2241021038  
Jurusan : Administrasi publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik  
Judul Tesis : **STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PERMENPANRB No.16 TAHUN 2017**  
Judul Tesis : **STRATEGI FOR IMPLEMENTING PUBLIC PARTICIPATION POLICIES PUBLIK SERVICE**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Edy Sutrisno, M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, MA)

**PROGRAM STUDI**  
**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**  
**MAGISTER TERAPAN**  
**POLITEKNIK STIALAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Rachmat  
NPM : 2241021038  
Jurusan : Administrasi publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik  
Judul Tesis : **STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PERMENPANRB No.16 TAHUN 2017**  
Judul Tesis : **STRATEGI FOR IMPLEMENTING PUBLIC PARTICIPATION POLICIES PUBLIK SERVICE**

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program  
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA  
LAN Jakarta Lembaga Administrasi Negara, Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 9 Nopember 2023  
Pukul : 9.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua sidang : Dr. Hamka, MA  
Sekretaris : Dr. Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si  
Anggota/Pembimbing I : Dr. Edy Sutrisno, M.Si  
Anggota/Pembimbing II : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA  
Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si



*[Handwritten signatures in blue ink over the logo and text]*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat  
NPM : 2241021038  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik PermenPANRB No. 16 tahun 2017” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan dari hasil penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 November 2023

Pembuat Pernyataan,

  
Rachmat

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya hingga tesis ini dapat diselesaikan serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang telah diharapkan. Penulisan tesis ini berjudul “STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PERMENPANRB No.16 TAHUN 2017” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap) pada jurusan Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulisan ini tidak mungkin terwujud sebagai mana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kementerian PANRB yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menempuh pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Ibu Deputy Bidang Pelayanan Publik yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menempuh pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Asisten Deputy Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menempuh pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta serta memberikan ijin untuk melakukan penelitian pada Asisten Deputy Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
4. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.Si., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan magister di Politeknik STIA LAN Jakarta.
5. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si., selaku Pembimbingan I yang selalu memberikan bimbingan serta semangat dalam pengerjaan tesis hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA, selaku Pembimbingan II yang selalu memberikan bimbingan serta semangat dalam pengerjaan tesis hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Dosen Penguji Bapak Dr. Hamka, MA, Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T.,M.Si, Dr. Ridwan Rajab, M.Si yang memberikan saran dan masukan untuk tesis yang saya buat ini menjadi lebih baik.
8. Rekan-rekan dilingkungan Deputy Bidang Pelayanan dan Asisten Deputy Pembardayaan Partisipasi Masyarakat yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan masukan dalam penelitian ini.
9. Istri saya tercinta Fitri Sariyani dan anak-anak ku tersayang Adisty Kamila, Rafi Aditya Renata, Athafariz Radeya Rachmat yang selalu memberikan semangat dalam penyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Saya berharap tesis ini dapat memberikan saran dan pemikiran sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Kementerian PANRB khusus pada Deputy Bidang Pelayanan Publik. Selanjut saya meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyusunan tesis ini dan saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 November 2023

Rachmat

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PERATURAN MENTERI PANRB NO.16 TAHUN 2017**

**Rachmat, Edy Sutrisno dan Mala Sondang Silitonga**

**maxdepoel@gmail.com**

**Politeknik STIALAN Jakarta**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan strategi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 menjadi lebih optimal dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan analisis teori Van Meter dan Van Horn dari 6 aspek yang dapat mempengaruhi dan kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa factor utama yang menjadi kendala dan hambatan tidak optimalnya yang pertama adalah kurangnya dukungan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan FKP yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia kalau dilihat dari hasil penelitian ini juga menjadi factor kendala yang di hadapi pada masing-masing UPP dan yang ketiga adalah kurangnya komitmen pimpinan kepala UPP untuk melaksanakan FKP. Untuk itu strategi yang dilakukan dalam upaya mendorong optimalisasi implemntasi dilakukan langkah-langkah melakukan revisi peraturan Menteri PANRB atau membuat surat edaran Menteri yang menekankan kepada UPP untuk melaksanakan FKP sebagai bentuk penilaian kinerja dan dimasukkan menjadi salah satu indictor indek reformasi birokrasi sehingga mampu mendorong optimalisasi dari kebijakan ini

Kata kunci: Forum Konsultasi Publik, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION STRATEGIES OF COMMUNITY PARTICIPATION POLICY IN PUBLIC SERVICES MINISTER OF PANRB REGULATION NO. 16 OF 2017**

Rachmat, Edy Sutrisno, and Mala Sondang Silitonga  
maxdepoel@gmail.com  
STIALAN Politechnik, Jakarta

The aim of this research is to formulate strategies for the optimal implementation of Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 16 of 2017 in its execution. Employing the analytical approach of Van Meter and Van Horn's theory, this study investigates six aspects that can influence and pose obstacles in the implementation of the policy. From the research findings, several key factors hindering optimal execution have been identified. Firstly, there is a lack of budgetary support for the execution of Community Consultation Forum (FKP) activities. Secondly, the insufficient human resources, as observed in this research, present a significant obstacle within each UPP (Public Service Agency). The third is the deficiency in commitment from the heads of UPP to carry out FKP. To address these challenges and promote optimized implementation, strategies include revising the Minister of PANRB regulations or issuing a Ministerial circular emphasizing the imperative execution of FKP by UPPs as a performance assessment. This should be incorporated as an indicator in the bureaucratic reform index to drive the optimization of this policy.

Keywords: Public Consultation Forum, Public Service Providers, Public Services, Community Participation

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I.....	1
PERMASALAHAN PENELITIAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Permasalahan.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Kebijakan.....	10
1. Teori Administrasi Publik.....	11
D. Lingkup administrasi publik.....	13
2. Teori Kebijakan Publik.....	13
3. Teori Partisipasi Masyarakat .....	16
4. Teori Pelayanan Publik.....	21
5. Teori Strategi .....	24
6. Teori Implementasi Kebijakan.....	26
BAB III .....	39
METODOLOGI PENELITIAN.....	39

A. Metode Penelitian .....	39
1. Pendekatan penelitian .....	39
2. Lokasi dan Rencana Waktu Penelitian .....	40
B. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Wawancara.....	40
2. Observasi .....	41
C. Validasi Data .....	42
D. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.....	44
E. Instrumen Penelitian.....	45
BAB IV .....	50
HASIL PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum .....	50
B. Implementasi Kebijakan Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 .....	53
1. Faktor-faktor yang menyebabkan FKP implementasi kebijakan Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 belum optimal .....	56
2. Kendala Implementasi Kebijakan .....	59
3. Strategi Meningkatkan Optimalisasi Implementasi Kebijakan Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017.....	69
4. Strategi mengatasi keterbatasan anggaran .....	70
5. Strategi meningkatkan kapasitas SDM .....	73
6. Strategi meningkatkan komitmen pada kebijakan publik.....	76
BAB V.....	96
KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	98
LAMPIRAN.....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kepatuhan Tahun 2022 .....	3
Tabel 2. 1 Kontinum Partisipasi Publik .....	18
Tabel 3. 1 Daftar Key Informant Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara Mendalam.....	46
Tabel 4. 1 Implementasi Kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) .....	58
Tabel 4. 2 Kendala Kinerja Implementasi Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 pada Aspek Standar dan Tujuan Kebijakan .....	60
Tabel 4. 3 3 Kendala Kinerja Implementasi Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 pada Aspek Sumber Kebijakan .....	62
Tabel 4. 4 Kendala Kinerja Implementasi Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 pada Aspek Komunikasi Antar Organisasi Kegiatan.....	63
Tabel 4. 5 Kendala Kinerja Implementasi Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 pada Aspek Karakteristik Badan Pelaksana .....	64
Tabel 4. 6 Kendala Kinerja Implementasi Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 pada Aspek Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik .....	66
Tabel 4. 7 Kendala Kinerja Implementasi Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 pada Aspek Kecenderungan Pelaksana.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tren Capaian Pelaksanaan FKP Periode 2020-2022 .....	3
Gambar 1. 2 Tren Indeks Pelayanan Publik.....	4
Gambar 2. 1 Penyebab dan Konsekuensi dalam Kebijakan Publik .....	14
Gambar 2. 2 Model Kebijakan Edward III (1980).....	29
Gambar 2. 3 Model Implementasi Kebijakan Grindle .....	30
Gambar 2. 4 Model Mazmanian & Sabatier (1983).....	32
Gambar 2. 5 Model Sistem Penyampaian Kebijakan.....	33
Gambar 2. 6 Model Proses Implementasi Kebijakan.....	35
Gambar 2. 7 Kerangka Berfikir.....	38

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA  
JAKARTA

# **BAB I**

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelayanan publik adalah aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bertujuan memenuhi keperluan pelayanan untuk warga negara dan penduduk. Lingkup pelayanan ini meliputi barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang dilayani oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 39 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan dalam pelayanan publik melalui kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kemudian peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 tahun 2017 yang mengatur pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah kegiatan dialog dan diskusi yang melibatkan penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat secara partisipatif. Setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk melaksanakan FKP guna melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama dalam upaya reformasi birokrasi. Salah satu instrumen kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP). Regulasi ini mengamanatkan perlunya pengaktifan forum konsultasi publik sebagai wadah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pelayanan publik.

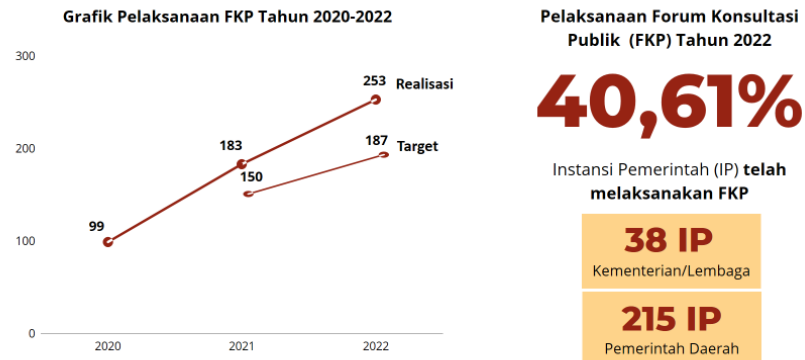
Meskipun kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Mengingat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi kebijakan partisipasi masyarakat, khususnya terkait dengan FKP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017. Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas kebijakan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Pada era globalisasi seperti saat ini, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan berkualitas semakin meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, termasuk pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Meskipun kebijakan ini telah ada sejak tahun 2017, implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi FKP yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik dan dilaporkan melalui Kementerian PANRB, hanya sebesar 40,61% unit penyelenggara yang telah melaksanakan FKP. Terdapat 38 instansi pemerintah kementerian/lembaga dan 215 pemerintah daerah yang telah melaksanakan FKP, seperti terlihat dalam Gambar 1.1.

## Data Capaian Pelaksanaan FKP



**Gambar 1. 1 Tren Capaian Pelaksanaan FKP Periode 2020-2022**

Sumber: PNRB (2023)

Tabel berikut merupakan hasil penilaian kepatuhan tahun 2022 yang dilakukan oleh Ombudsman RI:

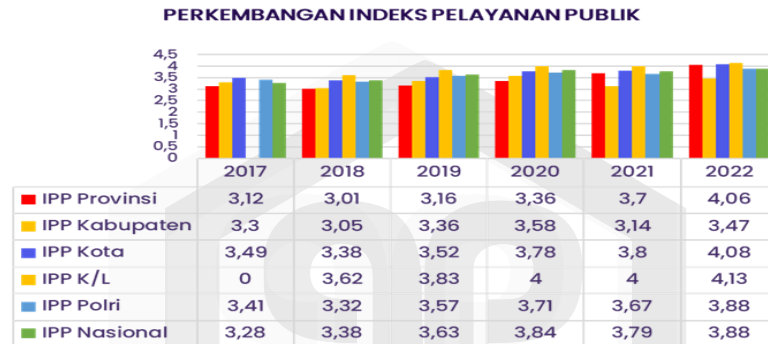
**Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kepatuhan Tahun 2022**

Jumlah Hasil Kepatuhan Tahun 2022	Total	Persentase
Baik	272	46,42%
Cukup	250	42.66%
Buruk	64	10.92%
<b>Grand Total</b>	<b>586</b>	<b>100%</b>

Sumber: Ombudsman RI (2023)

Tabel 1,1 menampilkan penilaian Ombudsman RI tentang beberapa unit penyelenggara pelayanan publik pada tahun 2022. Setiap unit diberikan skor kepatuhan, yang mencerminkan tingkat kesesuaian mereka dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Skor tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat kinerja dan kepatuhan masing-masing unit penyelenggara terhadap peraturan pelayanan publik.

Data perkembangan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang ditunjukkan dalam Gambar 1.2 menunjukkan tren fluktuatif.



**Gambar 1. 2 Tren Indeks Pelayanan Publik**

Sumber: KemenPANRB (2023)

Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) yang menunjukkan peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, nilai IPP nasional mengalami penurunan menjadi 3,79, yang masih termasuk dalam kategori Baik (B). Penurunan ini terjadi karena penambahan lokus evaluasi yang cukup signifikan. Hanya saja pada tahun 2022, nilai IPP kembali mengalami kenaikan menjadi 3,88 dan tetap berada dalam kategori Baik (B). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2022, terdapat 113.989 laporan masuk yang disampaikan oleh masyarakat ke dalam SP4N-LAPOR. Diketahui terjadi fluktuasi setiap bulannya dan pada bulan Juni mengalami tren kenaikan. Dari keseluruhan laporan masuk, rata-rata terdapat 331 laporan masuk per hari dimana laporan masuk paling banyak terjadi pada 2 Desember 2022 sebanyak 985 laporan masuk sedangkan jumlah laporan paling sedikit terjadi pada 14 April 2022 hanya terdapat 16 laporan masuk. Dari data pengaduan yang masih sangat banyak ini berbanding terbalik dengan capaian indek pelayanan publik secara nasional yang mendapatkan predikat kategori baik.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dalam konteks implementasi kebijakan, termasuk penelitian oleh Rachman et al. (2020) mengenai kualitas partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan e-government, penelitian oleh Dini et al. (2019) mengenai variabel yang menghalangi keikutsertaan publik dalam penerapan kebijakan e-government di Indonesia, penelitian oleh Rahma (2019) mengenai transformasi masyarakat Aceh setelah perjanjian damai dengan pemerintah, dan penelitian oleh Nadilla (2019) mengenai keterlibatan masyarakat terkait kebijakan berdasarkan HAM.

Namun, belum ada riset yang secara khusus menganalisis implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017, khususnya dengan menggunakan model proses penerapan kebijakan dari Meter & Horn (1975). Oleh karena itu, ada kekosongan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi.

Dalam konteks implementasi yang belum optimal dari Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017, studi ini memiliki tujuan untuk membuat strategi guna mengoptimalkan implementasi Permen tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala implementasi serta strategi terkait implementasi kebijakan yang terkait dengan Permen PANRB tersebut menggunakan model proses penerapan kebijakan dari Meter dan Van Horn (1975). Enam komponen model Sistem Penyampaian Kebijakan akan dianalisis, yaitu lingkungan sistem, tuntutan dan sumber daya, proses konversi, kebijakan, kinerja kebijakan, dan umpan balik.

Untuk analisis yang lebih mendalam terhadap kendala dan strategi implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori model Meter & Van Horn (1975) tentang proses implementasi kebijakan. Teori ini menekankan pada 6 aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi dan penegakkan antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi sosial dan politik, dan disposisi pelaksanaan. Diharapkan dapat menjawab kendala-kendala yang di hadapi dalam implementasi kebijakan tersebut agar menjadi optimal.

## **B. Identifikasi Permasalahan**

Identifikasi masalah utama dalam implementasi kebijakan Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat unit penyelenggara pelayanan publik yang belum melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Terdapat unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah merencanakan melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 namun dalam pelaksanaannya terbentur pada masalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM).
3. Terdapat unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut.
4. Pelibatan masyarakat, akademisi/pakar media dan unsur lainnya masih belum mengacu pada Permen PANRB No 16 Tahun 2017.
5. Belum ada strategi optimalisasi implementasi kebijakan Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 guna meningkatkan optimalisasi implementasi kebijakan tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai belum optimalnya implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik Permen PANRB No. 16 Tahun 2017, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi kebijakan Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 belum optimal?
2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Mencari factor-faktor dan kendala kurang optimalnya implementasi peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dilingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Menyusun strategi implementasi kebijakan Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam implementasinya.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis/ akademis**

Diharapkan hasil riset ini dapat berkontribusi empiris untuk ilmu kebijakan publik. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kendala-kendala dalam implementasi kebijakan publik serta strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pelayanan publik

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diasumsikan mampu berkontribusi bagi instansi Kementerian PANRB dalam meningkatkan implementasi kebijakan secara lebih optimal, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat. Riset dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.